

Realisasi Program Kegiatan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)	Target		Realisasi		Selisih Anggaran	%	Alasan Ketidak Tercapaian Realisasi Anggaran
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Urusan Penunjang									
4.08	Sekretariat Daerah				2.921.575.000		2.296.649.606	624.925.394	78.61 %	
4.08 . 4.08.01	Bagian Hukum				2.921.575.000		2.296.649.606	624.925.394	78.61 %	
4.08 . 04.08.01 . 08 . 0	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				433.635.000		317.247.234	116.387.766	73.16 %	
4.08 . 04.08.01 . 08 . 0	Pembentukan unit bantuan hukum	1. Jumlah Perkara yang terselesaikan dalam 1 Tahun, 2. Jumlah Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin	1. Prosentase Perkara yang terselesaikan 2. Prosentase Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin yang terealisasi	1. 12 Perkara, 2. 8 Perkara	334.400.000	1. 12 Perkara, 2. 0 Perkara	243.577.500	90.822.500	72.84 %	- Tidak ada klaim bantuan hukum kepada masyarakat miskin. - Pencabutan 7 perkara gugatan pasca pilkades e-Votting tidak sampai pada putusan.
4.08 . 04.08.01 . 08 . 0	Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat	1. Jumlah Permasalahan Hukum yang terinventarisir dalam 1 tahun, 2. Jumlah Permasalahan Hukum yang terselesaikan dalam 1 tahun, 3. Jumlah Legal Opinion dalam 1 tahun	1. Prosentase Permasalahan Hukum yang terinventarisir dalam 1 tahun, 2. Prosentase Permasalahan Hukum yang terselesaikan dalam 1 tahun, 3. Prosentase Legal Opinion dalam 1 tahun	1. 14 Permasalahan, 2. 14 Permasalahan, 3. 2 LO	99.235.000	1. 14 Permasalahan, 2. 14 Permasalahan, 3. 0 LO	73.669.734	25.565.266	999999 %	Legal Opinion tidak ada
4.08 . 04.08.01 . 08 . 0	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				2.487.940.000		1.979.402.372	508.537.628	79.56 %	
4.08 . 04.08.01 . 08 . 0	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Propemperda yang disusun dalam 1 tahun	Pelaksanaan Pembahasan Propemperda dalam 1 tahun	1 Surat Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019	55.000.000	1 Surat Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019	53.971.534	1.028.466	98.13 %	
4.08 . 04.08.01 . 08 . 0	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	1. Jumlah Pra Raperda menjadi Raperda di Eksekutif, 2. Jumlah Raperda menjadi Perda dalam 1 tahun, 3. Jumlah Sosialisasi Raperda, 4. Jumlah Penyelenggaraan Legal Drafting 2 kegiatan dalam 1 tahun	1. Prosentase Tersusunnya Legislasi Pra Raperda menjadi Raperda, 2. Prosentase Tersusunnya Legislasi Raperda menjadi Perda, 3. Prosentase Terlaksananya Sosialisasi Raperda, 4. Prosentase meningkatnya kualitas dan kompetensi ASN dalam penyusunan produk hukum daerah	1. 23 Raperda, 2. 20 Perda, 3. 20 Raperda 4. 50 Peserta	550.000.000	1. 23 Raperda, 2. 18 Perda, 3. 20 Raperda 4. 50 Peserta	419.416.322	130.583.678	000001 %	Pembahasan Raperda di DPRD hanya dua tahap, tahap tiga tidak ada.

4.08 . 04.08.01. 08 . 0	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dalam 1 tahun	Prosentase Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	28 Sosialisasi	295.000.000	28 Sosialisasi	265.831.378	29.168.622	90.11 %	
4.08 . 04.08.01. 08 . 0	Publikasi peraturan perundang-undangan	1. Jumlah Buku Himpunan Produk Hukum Daerah yang dicetak, 2. Jumlah Buku Produk Hukum Daerah yang dicetak, 3. Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang tersedia, 4. Jumlah Buku Himpunan Peraturan Daerah Tahun 1973 - 2017	1. Prosentase Jumlah Buku Himpunan Produk Hukum Daerah yang dicetak, 2. Prosentase Jumlah Buku Produk Hukum Daerah yang dicetak, 3. Prosentase Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang tersedia, 4. Prosentase Jumlah Buku Himpunan Peraturan Daerah Tahun 1973-2017	1. 600 buku, 2. 6000 buku, 3. 100 buku, 4. 170 buku	502.680.000	1. 600 buku, 2. 6000 buku, 3. 100 buku, 4. 170 buku	483.946.400	18.733.600	96.27 %	
4.08 . 04.08.01. 08 . 0	Penyuluhan peraturan perundang-undangan	1. Jumlah Kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan di desa dalam 1 tahun, 2. Jumlah Kelompok Peserta Lomba Permainan Beberan Ular Tangga	1. Prosentase meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di desa, 2. Prosentase meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat di desa	1. 6 Penyuluhan, 2. 14 Kelompok	164.000.000	1. 6 Penyuluhan, 2. 14 Kelompok	156.061.000	7.939.000	95.16 %	
4.08 . 04.08.01. 08 . 0	Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	1. Jumlah Peraturan Bupati dalam 1 Tahun, 2. Jumlah Keputusan Bupati dalam 1 Tahun, 3. Jumlah Instruksi Bupati dalam 1 Tahun, 4. Jumlah Surat Edaran Bupati/Sekda dalam 1 Tahun, 5. Jumlah Keputusan Sekda dalam 1 Tahun	Terlaksananya Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	1. 50 Perbup, 2. 650 Keputusan Bupati, 3. 2 Instruksi Bupati, 4. 10 SE Bupati/Sekda, 5. 50 Keputusan Sekda	200.000.000	1. 93 Perbup, 2. 1530 Keputusan Bupati, 3. 0 Instruksi Bupati, 4. 3 SE Bupati/Sekda, 5. 70 Keputusan Sekda	193.592.828	6.407.172	96.8 %	
4.08 . 04.08.01. 08 . 0	Fasilitasi KEluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum	1. Jumlah Peserta Lomba Kadarkum, 2. Jumlah Kelompok Kadarkum yang dibentuk/dibina, 3. Jumlah Desa Sadar Hukum yang dibentuk, 4. Jumlah pemecahan rekor Muri penyuluhan hukum dengan metode ular tangga	1. Prosentase jumlah peserta lomba kadarkum, 2. Prosentase jumlah kelompok Kadarkum yang dibentuk/dibina, 3. Prosentase jumlah desa sadar hukum yang dibentuk, 4. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat	1. 14 Kelompok, 2. 6 Kelompok, 3. 14 Desa, 4. 2012 Kelompok	417.135.000	1. 14 Kelompok, 2. 6 Kelompok, 3. 0 Desa, 4. 0 Kelompok	168.241.500	248.893.500	40.33 %	Penyelenggaraan Temu Kader PKK dalam pemecahan rekor MURI simulasi penyuluhan hukum dengan metode permainan ular tangga tertunda mengingat adanya penyelenggaraan Pilkades e-Voting secara serentak.

4.08 . 04.08.01. 08 . 0	Fasilitasi Pemenuhan HAM	1. Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Aksi HAM dan Kab./Kota Peduli HAM, 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi HAM yang disusun, 3. Jumlah Laporan Data Peduli HAM yang disusun	1. Prosentase Peserta yang seharusnya mengikuti sosialisasi Aksi HAM, 2. Prosentase Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi HAM yang disusun, 3. Prosentase Laporan Data Peduli HAM yang disusun	1. 75 Orang, 2. 4 Laporan, 3. 1 Laporan	149.125.000	1. 75 Orang, 2. 4 Laporan, 3. 1 Laporan	115.819.585	33.305.415	77.67 %	Adanya perubahan tempat pada penyelenggaraan penyerahan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada peringatan hari HAM sedunia ke-70 tahun 2018.
4.08 . 04.08.01. 08 . 0	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum Daerah dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Klarifikasi Produk Hukum Desa Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Dan Keserasian Antara Peraturan Perundang-Undangan Desa	1. Jumlah Rancangan Produk Hukum Desa yang di evaluasi, 2. Jumlah Produk Hukum Desa yang diklarifikasi	Prosentase Jumlah Produk Hukum Desa yang di Evaluasi dan di Klarifikasi	1. 600 Rancangan Produk Hukum Desa, 2. 600 Produk Hukum Desa	155.000.000	1. 0 Rancangan Produk Hukum Desa, 2. 600 Produk Hukum Desa	122.521.825	32.478.175	79.05 %	Pelimpahan tugas evaluasi Perdes ke Kecamatan